Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kota Blitar

LEVEL: STRATEGIS DAERAH

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	IK : Opini BPK atas LKPD	Kepala BPKAD	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Seluruh OPD

LEVEL: URUSAN SUBURUSAN

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	IK : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala BPKAD	Pengelolaan Keuangan dimulai dari Perencanaan s/d Pelaporan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh OPD
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	IK : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	OPD Penghasil PAD
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	IK : Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Kepala BPKAD	Pengelolaan Aset Daerah mulai dari Perencanaan s/d Pelaporan	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Seluruh OPD

LEVEL: TAKTIKAL PROGRAM

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Meningkatnya Tata Kelola anggaran	IK : 1. Presentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD IK : 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Kepala Bidang Anggaran	Tata Kelola Anggaran	1. Presentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Seluruh OPD
2	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	IK : 1. Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar IK : 2. Persentase Penurunan SILPA	Kepala Bidang Perbendaharaan	Pengelolaan Perbendaharaan/Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA	Seluruh OPD
3	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	IK : Persentase laporan keuangan tepat waktu	Kepala Bidang Akuntansi	Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Seluruh OPD
4	Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	IK : 1. Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD IK : 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD IK : 3. Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi	Pengelolaan Pendapatan Daerah terutama PAD	1. Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD 3. Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah	Seluruh OPD Penghasil PAD
5	Meningkatnya tata kelola Aset Daerah	IK : Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Kepala Bidang Aset	Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Perencanaan s/d Pelaporan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Seluruh OPD

LEVEL: TAKTIKAL KEGIATAN

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Tertibnya penyusunan dokumen penganggaran	IK : Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	Kasubid Perencanaan Anggaran dan Kasubid Pengendalian Anggaran	Penyusunan Anggaran mulai dari KUA PPAS s/d DPA	Tertibnya penyusunan dokumen penganggaran	Seluruh OPD
2	Tertibnya pengelolaan perbendaharaan	IK : Persentase penatausahaan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kasubid Pengelolaan Kas dan Investasi dan Kasubid Verifikasi Belanja dan Pendapatan	Pengelolaan Perbendaharaan/Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Seluruh OPD
3	Tertibnya penyusunan pelaporan keuangan	IK : Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi	Kasubid Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi	Seluruh OPD
4	Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	IK : 1. Persentase kepatuhan wajib pajak daerah terhadap pelaporan pajak (omset dan pembayaran/self assesment) IK : 2. Persentase kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah IK : 3. Persentase kepatuhan pelaporan potensi retribusi Perangkat Daerah	Kasubid Penilaian dan Penetapan, Kasubid Pengolahan Data dan Informasi, Kasubid Penyelesaian Keberatan, Kasubid Penagihan dan AKPD Ahli Muda	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase kepatuhan wajib pajak daerah terhadap pelaporan pajak (omset dan pembayaran/self assesment) 2. Persentase kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah 3. Persentase kepatuhan	Seluruh OPD Penghasil PAD

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
5	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	IK : Persentase pelaporan pengelolaan BMD (mulai perencanaan s/d pengendalian) tepat waktu	Kasubid Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang dan Kasubid Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Daerah	Pengelolaan BMD (mulai perencanaan s/d pengendalian) tepat waktu	Persentase pelaporan pengelolaan BMD (mulai perencanaan s/d pengendalian) tepat waktu	Seluruh OPD

LEVEL: OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Tersusunnya KUA, PPAS dan Perubahannya	IK : Jumlah dokumen KUA, PPAS dan Perubahannya yang disusun	Kasubid Perencanaan Anggaran	Penyusunan KUA, PPAS dan Perubahannya	Jumlah dokumen KUA, PPAS dan Perubahannya yang disusun	Seluruh OPD
2	Terlaksananya asistensi, verifikasi dan penetapan dokumen penganggaran	IK : Jumlah dokumen RKA, DPA, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya yang ditetapkan	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	asistensi dan verifikasi dokumen RKA, DPA beserta perubahannya	umlah dokumen RKA, DPA, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya yang ditetapkan	Seluruh OPD
3	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Anggaran yang disusun	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Penyusunan Perwali ASB, SE Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Anggaran yang disusun	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Terlaksananya pembinaan penganggaran	IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Sosialisasi kepada Tim Asistensi dan Penyusun Anggaran/Perencana/Program tentang Penyusunan APBD	umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran	Seluruh OPD

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
5	Terlaksananya Inventarisasi, Analisis dan Publikasi dokumen APBD	IK : Jumlah Dokumen Inventarisasi, Analisis dan Publikasi APBD yang tersedia dan dipublikasikan	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Publikasi dokumen APBD, Updating Aplikasi Monalisa	Jumlah Dokumen Inventarisasi, Analisis dan Publikasi APBD yang tersedia dan dipublikasikan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
6	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	IK : Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Kasubid Pengelolaan Kas dan Investasi	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Seluruh OPD
7	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	IK : Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Seluruh OPD
8	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan SIPD Bidang Keuangan	Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada PPK-SKPD dan Bendahara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan SIPD Bidang Keuangan	Seluruh OPD
9	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Penatausahaan Belanja Tidak Terduga	umlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Seluruh OPD pengusul
10	Tersusunnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan	IK : Jumlah Kebijakan Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan	Penyusunan SE Penatausahaan Keuangan Daerah Awal dan Akhir Tahun	Jumlah Kebijakan Penatausahaan Keuangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
11	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	IK : Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Seluruh OPD

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
12	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Pertanggungjawaban APBD	IK : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Rancangan Perda dan Perwali Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Seluruh OPD
13	Tersedianya Tanggapan/LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	IK : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Tanggapan LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	Inspektorat Daerah
14	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan TGR	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah
15	Tersedianya Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikelola	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan	Updating aplikasi SIKD/Integrasi Data dari SIPD untuk pelaporan keuangan	Jumlah Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikelola	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
16	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan	Penyusunan Kebijakan Akuntansi	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
17	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Orang yang Mendapat Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan	Pembinaan kepada Tim Akuntansi	Jumlah Orang yang Mendapat Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Seluruh OPD
18	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Daerah	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Analisis Investasi BPR dan PDAM	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Daerah	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, BPR dan PDAM
19	Terlaksananya Perencanaan Pajak Daerah	IK : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kasubid Pengolahan Data dan Informasi	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Seluruh OPD Penghasil PAD
20	Tersusunnya Kebijakan dan Kajian Pajak Daerah	IK : Jumlah Kebijakan dan Kajian Pajak Daerah yang tersusun	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Penyusunan Regulasi Pajak Daerah, Kajian Potensi Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan dan Kajian Pajak Daerah yang tersusun	Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan OPD Penghasil PAD
21	Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan Pajak Daerah	IK : Jumlah Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan	Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan dan Peraturan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan Pajak Daerah	OPD Penghasil PAD, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
22	Terlaksananya Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	IK : Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Updating Database Pajak Daerah pada aplikasi SIMPBB, SIMBPHTB, PADAMOVEON	Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Kecamatan, Kelurahan, OPD Penghasil PAD, DPMPTSP
23	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	IK : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan	Penyesuaian/Penilaian NJOP PBB-P2	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kecamatan, kelurahan

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
24	Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah	IK : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan	Penetapan (SKP) Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	DPMPTSP
25	Tersedianya Layanan dan Konsultasi	IK : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak kepada Wajib Pajak yang dilakukan di Ruang Pelayanan Pajak termasuk di MPP	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	DPMPTSP
26	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	IK : Jumlah WP yang ditagih	Kepala Sub Bidang Penagihan	Penagihan kepada Wajib Pajak yang menunggak Pajak Daerah	umlah WP yang ditagih	Satpol PP, DPMPTSP
27	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	IK : Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan	Penyelesaian atas keberatan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak	Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
28	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	IK : Jumlah OPD Penghasil yang dibina dan diawasi	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan	Asistensi dan Rekonsiliasi atas Laporan Pengelolaan Retribusi OPD Penghasil PAD	Jumlah OPD Penghasil yang dibina dan diawasi	OPD Penghasil PAD
29	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Penagihan	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	SatpolPP, DPMPTSP
30	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	IK : Jumlah Standar Harga Yang disusun	Kasubid Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang disusun	Seluruh OPD
31	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Penyusunan RKBU	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD
32	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Standar Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Kebijakan Pengelolaan dan Standar Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Penyusunan Perwali, SK pengelolaan BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan dan Standar Barang Milik Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
33	Terlaksananya Inventarisasi BMD	IK : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Daerah	Melakukan Inventarisasi BMD dan menyusun laporannya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Seluruh OPD
34	Terlaksananya Pengamanan BMD	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Daerah	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD
35	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Seluruh OPD
36	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD
37	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD
38	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Daerah	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Seluruh OPD

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
39	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	IK : Jumlah Orang yang Mendapat Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mendapat Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD